

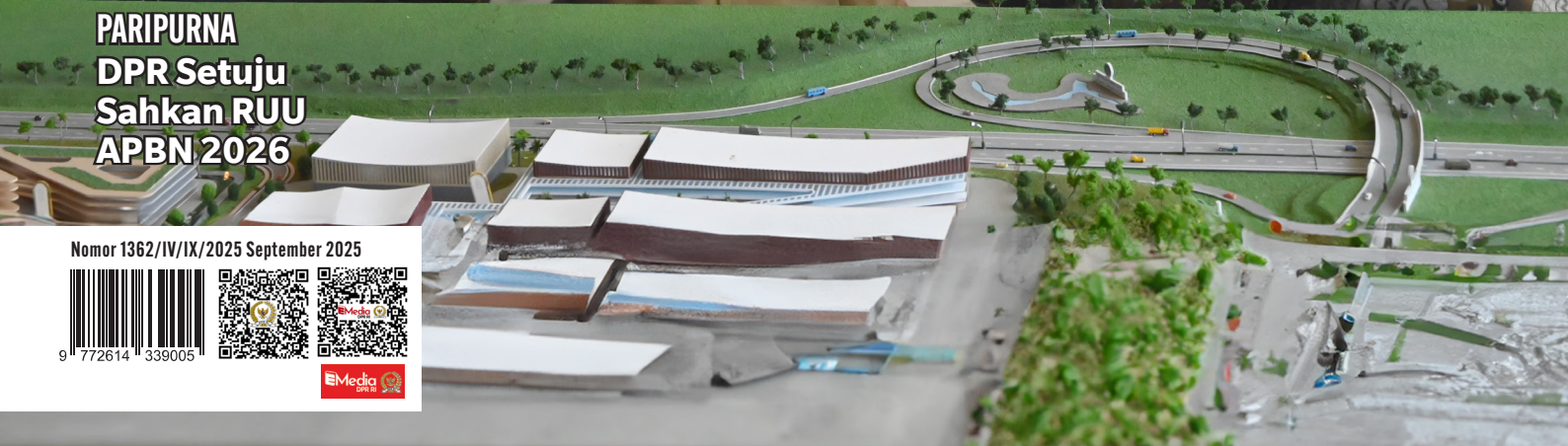
PARLEMENTARIA

KEK Batang Harus Beri Manfaat Nyata



**PARIPURNA
DPR Setujui Calon
Hakim Agung dan
Hakim Ad Hoc**

**PARIPURNA
DPR Setuju
Sahkan RUU
APBN 2026**



Nomor 1362/IV/IX/2025 September 2025



9 772614 339005



KEK Batang Harus Beri Manfaat Nyata



FOTO: RDN/PDT

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah memimpin kunjungan kerja BAM ke Batang, Jawa Tengah, Senin (22/9/2025)

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Taufiq R. Abdullah menegaskan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Batang, Jawa Tengah, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke kawasan tersebut, fokus utama diarahkan ke KEK Industri Batang yang diproyeksikan mampu membuka lebih dari 250.000 lapangan kerja.

Ia menilai bahwa itu menjadi peluang yang sangat baik di

tengah tantangan-tantangan ketenagakerjaan. Terlebih, Indonesia tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan. "Dengan dukungan infrastruktur, insentif fiskal, dan kemudahan berusaha, kawasan ini diharapkan menjadi pusat investasi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional," tutur Taufiq.

Dalam kesempatan tersebut, BAM juga menyerap aspirasi berbagai pihak terkait kendala pengelolaan kawasan, investor, maupun pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Selain Taufiq, Anggota BAM Muhammad Haris menegaskan

pentingnya keberpihakan pada tenaga kerja lokal dalam pengembangan kawasan tersebut. "Penyerapan tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal, masyarakat Batang, sehingga problem pengangguran yang ada di Kabupaten Batang bisa teratasi dengan sebaik-baiknya," ujar Haris dalam kesempatan itu.

Haris berharap komposisi tenaga kerja lokal dapat terus ditingkatkan. "Harapannya ke depan lebih banyak lagi merekrut tenaga kerja dari Batang dan Jawa Tengah, sehingga problem pengangguran 4,7 persen di Jawa Tengah bisa teratasi dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

hal/rdn



DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc



Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro saat menyerahkan laporan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

DPR RI telah menyetujui 10 calon hakim agung dan hakim *ad hoc* Mahkamah Agung (MA) memangku jabatan tersebut. Persetujuan ini diberikan setelah Komisi III DPR RI menyelesaikan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap para calon.

“Kami berikhtiar semaksimal mungkin untuk memilih calon yang diyakini mampu menjunjung tinggi profesionalisme serta memiliki rekam jejak yang tak tercela,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro dalam laporannya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Berikut adalah nama-nama yang disetujui:

1. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Pidana.
2. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Agung pada

Kamar Perdata.

3. Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Agung pada Kamar Perdata.
4. Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama.
5. Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Agama.
6. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara (TUN).
7. Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum. sebagai Hakim Agung pada Kamar TUN (Khusus Pajak).
8. Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar TUN (Khusus Pajak).
9. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Agung pada Kamar Militer.
10. Dr. Moh. Puguh Haryogi, S.H., Sp.N., M.H. sebagai Hakim Ad Hoc HAM.

bia/aha



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md.

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom., Hira Askamal, S.I.Kom., Bianca Destianti, S.I.Kom., Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom., Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom., Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom., Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrull, Puritno Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmim Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afidhillah, Geraldio Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri, Mario Fernandez

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom.

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom., Savant Rifqi Hidayat, S.E., Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
Adi Ardiansyah, M.M.

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: OJ/PDT

Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah, saat menyerahkan laporan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

DPR resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil usai seluruh fraksi menyatakan menerima hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Ketua Banggar DPR RI MH Said Abdullah, dalam laporannya menegaskan bahwa RAPBN 2026 dirancang bukan sekadar catatan angka, melainkan instrumen negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Terkait pertumbuhan ekonomi 5,4 persen yang disepakati, menurutnya keyakinan ini

DPR Setuju Sahkan RUU APBN 2026

akan menjadi pijakan penting demi mendorong target jangka menengah sebesar 7–8 persen. Dengan stabilitas inflasi, kurs, dan suku bunga, ia berharap APBN 2026 mampu menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Said menegaskan RAPBN 2026 harus berfungsi bukan hanya sebagai dokumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen nyata menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki kesenjangan sosial, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup.

“Krisis iklim sudah nyata memangkas kekuatan fiskal kita, sehingga pembangunan berwawasan jangka panjang menjadi sebuah keharusan,” terangnya.

Menutup laporan, Said menegaskan pemerintah harus bisa memanfaatkan kekuatan fiskal ini dengan gesit, kreatif, dan inovatif agar benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya, APBN 2026 mampu menahan guncangan, melindungi rakyat miskin, memperkuat UMKM, serta mendorong kebangkitan industri nasional. **nga ada**

Scan QR untuk berita selengkapnya



198 RUU dalam Prolegnas 2025–2029



Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan pada Rapat Paripurna, Selasa (23/9/2025).

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029, Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025, serta menetapkan Prolegnas Prioritas 2026. Persetujuan tersebut menjadi tonggak penting dalam arah politik legislasi DPR untuk tahun mendatang.

Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan pada Selasa (23/9), Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat memimpin pengambilan keputusan. Ia menanyakan langsung kepada forum sidang mengenai persetujuan perubahan Prolegnas yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi, Bob Hasan.

Sidang paripurna kemudian menyatakan persetujuan secara

serentak. Dengan ketukan palu, keputusan mengenai Prolegnas yang baru pun resmi berlaku. Persetujuan ini kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.

Sebelumnya dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Baleg DPR RI, evaluasi Prolegnas 2025 yang semula memuat 42 RUU mengalami penyesuaian. Sebagian RUU ditarik, salah satunya RUU tentang Keadilan Restoratif karena substansinya telah tercakup dalam pembahasan KUHAP baru. Namun, Baleg juga memasukkan 23 RUU usulan baru sebagai hasil evaluasi kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan penyesuaian tersebut, daftar Prolegnas mengalami perubahan signifikan. Jumlah RUU

dalam Perubahan Kedua Prolegnas Prioritas 2025 meningkat menjadi 52, Prolegnas jangka menengah 2025–2029 ditetapkan 198 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 berisi 67 RUU.

Beberapa usulan baru yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 terbaru, Prolegnas Prioritas 2026 serta Prolegnas jangka menengah 2025–2029 yang menjadi sorotan publik, antara lain; RUU tentang Perampasan Aset dan RUU tentang Transportasi Online. Selain itu, terdapat RUU terkait Perlindungan Pekerja Platform atau *gig worker* serta RUU Satu Data Indonesia. Agenda legislasi ini dipandang penting untuk mengisi kekosongan hukum sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan nasional. **uc/aha**





FOTO: RSB/PDT

Penyerahan dokumen Laporan Hasil Pembahasan tingkat 1 Baleg DPR RI mengenai Prolegnas kepada Pimpinan DPR RI.

RUU Perampasan Aset Jadi RUU Prioritas Prolegnas 2025

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2025-2026. RUU Perampasan Aset masuk bersama 51 daftar rancangan maupun revisi undang-undang yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Ketua Badan Legislasi (Baleg), Bob Hasan, mengungkapkan terdapat 23 RUU baru yang masuk dalam perubahan Prolegnas

2025-2026. Keputusan tersebut berdasarkan kesepakatan Baleg bersama panitia dan Kementerian Hukum (Kemenkum). Adapun salah satu RUU itu adalah RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana.

“Di antaranya RUU tentang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana, selanjutnya, RUU tentang Transportasi *Online*, RUU tentang Pekerja Lepas atau RUU tentang Pekerja *Platform* Indonesia atau RUU tentang Pekerja Ekonomi GIG, dan RUU tentang Satu Data Indonesia,” kata Bob Hasan di

Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).

Bob pun menjelaskan RUU itu baru masuk dalam Prolegnas 2025-2026 lantaran dalam rangka mengutamakan aturan untuk mengisi kekosongan hukum.

“Hasil evaluasi dalam rangka memprioritaskan aturan untuk mengisi kekosongan hukum, sebagai upaya legislasi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang tetap menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang bermuara pada keberlanjutan pembangunan nasional,” terangnya. **rdn**

Scan QR untuk berita selengkapannya



DPR Fokuskan Legislasi Berkelanjutan



Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, saat menyerahkan laporan evaluasi Prolegnas 2025 sekaligus arah penyusunan Prolegnas 2026 dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

DPR RI menekankan pentingnya kesinambungan dalam pembentukan undang-undang. Melalui evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, DPR RI berkomitmen memastikan setiap rancangan undang-undang tidak hanya menjawab kebutuhan hukum saat ini, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan.

Komitmen itu disampaikan Badan Legislasi DPR RI dalam Rapat Paripurna di Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan laporan hasil evaluasi Prolegnas 2025 sekaligus arah penyusunan Prolegnas 2026.

Evaluasi Prolegnas 2025 mencakup 42 rancangan

undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari jumlah tersebut, beberapa RUU sudah diundangkan, sementara lainnya masih dalam tahap pembahasan di komisi terkait.

Baleg juga mencatat adanya kebutuhan untuk melakukan penarikan terhadap beberapa rancangan undang-undang. Salah satunya adalah RUU tentang Keadilan Restoratif yang dinilai substansinya sudah tercakup dalam revisi KUHAP yang dibahas di Komisi III.

Dalam rangka penyusunan Prolegnas 2026, Baleg membentuk panitia kerja khusus. Panja ini merumuskan prioritas baru dengan mempertimbangkan kesinambungan legislasi yang sudah bergulir sepanjang 2025.

“Terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026,

Badan Legislasi bersama dengan Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI berkomitmen untuk menuntaskan legislasi yang telah berproses di tahun 2025 sebagai luncuran di Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dan selanjutnya di awal tahun 2026 kembali melakukan evaluasi untuk memfokuskan proses legislasi dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum pencapaian keberlanjutan pembangunan,” kata Bob yang juga merupakan anggota Komisi III DPR RI itu.

Selain itu, terdapat pula penambahan usulan baru dalam Prolegnas jangka menengah. Sebanyak 23 RUU baru dimasukkan ke dalam daftar Perubahan Prolegnas 2025–2029 yang dinilai relevan dengan dinamika kebutuhan hukum masyarakat. **uc/aha**



Serap Masukan RUU Penyiaran

Komisi I DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Persada ID dan JRKI. Rapat digelar untuk menjaring masukan dari *stakeholder* tersebut terkait dengan RUU Penyiaran.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyebut, sejauh ini RUU Penyiaran yang mulai bergulir sejak tahun 2012 telah mengalami perubahan ketiga. Hal ini karena RUU terus disesuaikan terhadap sejumlah perkembangan yang terjadi. Disisi lain, meski belum menyampaikan target secara detail, namun ia berharap RUU Penyiaran

dapat segera rampung oleh DPR periode 2024-2029 ini.

Sejauh ini RUU Penyiaran yang mulai bergulir sejak tahun 2012 telah mengalami perubahan ketiga. Hal ini karena RUU terus disesuaikan terhadap sejumlah perkembangan yang terjadi. Disisi lain, meski belum menyampaikan target secara detail

Lebih lanjut Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menilai pentingnya peran generasi muda dalam mendukung penyiaran nasional. Menurutnya, hal ini sebagai penguat dalam penyampaian informasi penyiaran.

“Peran Generasi Z dalam perkembangan penyiaran nasional juga harus diperhatikan, dengan demikian penyiaran Indonesia akan semakin berkembang,” tuturnya.

Seperti yang diketahui terdapat sejumlah catatan penting yang disoroti Panja Penyiaran antara lain yaitu tidak seimbangya distribusi izin siaran antar daerah, indikasi konglomerasi media yang mengancam keragaman isi siaran, minimnya ruang bagi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas, belum maksimalnya perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan dalam konten siaran, serta perlunya pemutakhiran regulasi untuk menyikapi konvergensi media digital dan penyiaran.

tn/aha



FOTO: OI/PDT



Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno usai RDPU dengan Persada ID dan JRKI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senin (22/9/2025).

Digitalisasi Pemda Harus Prioritaskan Pelayanan Publik

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menegaskan bahwa percepatan sistem digitalisasi di lingkup pemerintah daerah harus tetap menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama, meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran.

Fauzan mengakui bahwa sejak 2025 terjadi penurunan Tunjangan

Kinerja Daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber keluhan pemerintah daerah. Meski demikian, ia menekankan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kondisi tersebut.

"Ini kan mulai dari 2025 ya, ada penurunan TKD. Di 2026 memang belum diputuskan. Tetapi apapun itu, baik TKD tetap maupun

bertambah, yang tidak boleh berkurang itu adalah pelayanan publik. Jadi mau uangnya sedikit, mau uangnya banyak, pelayanan ke masyarakat harus menjadi prioritas utama," ujar Fauzan pada Parlementaria usai mengikuti kunjungan spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9).

Ia menambahkan, pemerintah daerah di Sumsel menyampaikan keluhan soal penurunan TKD yang berdampak pada semangat aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Namun, Fauzan mengingatkan bahwa tugas utama ASN adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Sekali lagi tugas fungsi utama dari aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan masyarakat. Karena itu pelayanan itu tidak boleh terpengaruh oleh apapun," tegasnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menyoroti pentingnya digitalisasi sebagai jawaban atas tuntutan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Menurutnya, meskipun pemda menghadapi keterbatasan fiskal, penerapan sistem digital harus terus dipercepat demi menghadirkan kualitas layanan yang lebih baik bagi masyarakat. **we/aha**

Tugas fungsi utama dari aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan masyarakat. Karena itu pelayanan itu tidak boleh terpengaruh oleh apapun

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid saat mengikuti kunjungan spesifik ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9/2025).



Partisipasi Publik Meluas dalam Pembahasan RUU KUHAP



FOTO: ENO/PDT

Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia, mahasiswa serta Indonesia Millennials Center di Senayan, Selasa (23/9/2025).

Transparansi dan partisipasi publik menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Agenda ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI bersama Ketua Ombudsman Republik Indonesia, mahasiswa serta *Indonesia Millennials Center*

pada Selasa (23/9) di Senayan, Jakarta.

Dalam paparannya, para narasumber sempat menyinggung pentingnya keterbukaan proses legislasi agar masyarakat dapat mengawal arah pembahasan. Terkait dengan hal ini, Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono angkat bicara.

“Terima kasih atas pengingatan kepada kami, tapi kami pun ingin memberikan gambaran juga bahwa

hari ini alhamdulillah mengenai transparansi proses, Bapak-Ibu sekalian, kita membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada publik,” ujar Bimantoro dalam rapat tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra menjelaskan, DPR telah membuka jalur partisipasi melalui kanal digital maupun forum langsung. Mekanisme ini dimaksudkan agar masyarakat dapat secara nyata mengikuti perkembangan pembahasan KUHAP sejak tahap awal.

“Dalam proses berjalan dari awal, kami membuka ruang-ruang digital yang bisa diakses melalui portal Youtube ataupun bisa

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembahasan KUHAP cukup tinggi. Tercatat puluhan organisasi sudah menyampaikan pandangan, dengan jumlah yang terus bertambah

langsung datang mengikuti proses berjalannya dari setiap masukan ataupun dari pembahasan KUHAP yang ada,” ungkapnya.

Menurut Bimantoro, sejauh ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembahasan KUHAP cukup tinggi. Tercatat puluhan organisasi sudah menyampaikan pandangan, dengan jumlah yang terus bertambah.

Ia menambahkan, antusiasme tersebut membuat DPR memperpanjang masa pembahasan. Keputusan itu disepakati seluruh fraksi agar setiap masukan bisa dikaji lebih mendalam sebelum disahkan. **uc/aha**



Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mengkritisi minimnya kontribusi sektor migas terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Ajbar mengungkapkan bahwa sumbangan migas terhadap struktur pendapatan negara hanya sekitar 6 persen, sementara daya rusaknya terhadap kawasan hutan dan lingkungan cukup besar.

“Dengan postur APBN 2026 yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, pemerintah perlu lebih

serius menangani persoalan lingkungan. Ajbar menyambut baik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ucap Ajbar di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (22/9).

Lebih lanjut, Ajbar mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengidentifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat sekitar, khususnya petani dan nelayan yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Menurutnya, potensi besar di kawasan hutan seharusnya

bisa digarap masyarakat dengan mekanisme legal sesuai prosedur yang berlaku.

“Jangan lagi ada ketakutan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan lindung. Selama ada aturan dan rekomendasi yang jelas, masyarakat harus diberi ruang agar bisa meningkatkan taraf hidup sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan sosialisasi yang masif dan dukungan anggaran, masyarakat sekitar hutan dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

dep/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar saat mengikuti kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (22/9/2025).



FOTO: OJI/ PDT

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi, di Senayan, Jakarta pada Senin (16/9/2025).

Kepastian Hukum bagi Desa dan Masyarakat Adat di Papua

Papua menjadi daerah yang paling terdampak dalam persoalan desa yang berada di kawasan hutan. Data resmi pemerintah menunjukkan sebagian besar daerah tertinggal ada di wilayah ini, sehingga Komisi V DPR RI menilai perhatian khusus mutlak diberikan agar masyarakat Papua tidak terus terpinggirkan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menyebut data pemerintah menunjukkan dari 30 daerah tertinggal di Indonesia,

sebanyak 26 di antaranya berada di Papua. Kondisi ini menggambarkan betapa seriusnya persoalan pembangunan desa di wilayah timur Indonesia tersebut.

“Kami melihat data pemerintah resmi daerah tertinggal itu jelas bahwa ada 30 daerah tertinggal di republik ini. Dari 30 itu 26 ada di Papua,” ujar Roberth saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa PDT dan Menteri Transmigrasi, di Senayan, Jakarta pada Senin (16/9).

Legislator Dapil Papua

Pegunungan itu menambahkan, dari 2.966 desa yang berada di dalam kawasan hutan sekitar 1.300 desa hampir di Papua dan sebagian besar masuk kategori sangat tertinggal. Menurutnya, hal ini semakin menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di sana.

Politisi Fraksi NasDem tersebut menekankan, persoalan Papua tidak bisa dipandang sama dengan daerah lain karena mayoritas wilayahnya adalah hutan adat dan tanah adat. Hal ini membuat masyarakat adat di Papua membutuhkan pengakuan dan penghormatan yang lebih serius dari negara.

Menurut Roberth, kepastian hukum atas status desa di kawasan hutan sangat penting agar masyarakat Papua tidak terus berada dalam ketidakjelasan. Ia berharap pemerintah segera menuntaskan persoalan ini agar pembangunan desa di Papua bisa berjalan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. **uc/aha**



BSI Harus Bisa Diterima Semua Golongan

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang karena potensi jumlah penduduk beragama Muslim yang besar. Pemerintah pun mengejawantahkan penerapan sistem syariah di Indonesia dengan membuat Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2021 lalu yang terbentuk dari pecahan bank bernafaskan syariah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menganut prinsip dalam ajaran Muslim, ekonomi syariah pun dinilai Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan syarat manfaat. Ia kemudian mendorong BSI agar bisa *go public* dan menampung nasabah dari masyarakat umum.

"BSI kita harapkan menjadi Bank yang betul-betul mempunyai latar belakang Syariah yang kita harapkan masyarakat kita dengan mayoritas Islam ini bisa diterima bukan hanya untuk kalangan umat muslim tapi syariah bisa global, *go public*, bisa diterima dengan masyarakat semua," katanya saat diwawancarai Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (17/9).

Perbedaan utama Bank syariah dan Bank konvensional terletak pada landasan operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menghindari bunga (riba), ketidakjelasan (gharar), dan perjudian (maysir), serta menggunakan sistem bagi hasil, sementara Bank

BSI kita harapkan menjadi Bank yang betul-betul mempunyai latar belakang Syariah yang kita harapkan masyarakat kita dengan mayoritas Islam ini bisa diterima bukan hanya untuk kalangan umat muslim tapi syariah bisa global

konvensional beroperasi dengan sistem bunga dan tidak terikat prinsip syariah.

Beberapa negara dengan penduduk Muslim yang besar juga memiliki Bank Syariah yang sudah mendunia. Data dari *The Asian Banker*, negara di kawasan Timur Tengah masih mendominasi daftar bank syariah terbesar di dunia.

Nasim pun meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memberikan perhatian lebih atas potensi besar BSI dalam gelanggang perbankan di dunia. — **ndn/aha**

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (17/9/2025).



FOTO: NDN/PDT



PLUT UMKM Bandung Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Komisi VII DPR RI melakukan pengawasan ke Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT UMKM) Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya penguatan peran PLUT sebagai pusat pembinaan UMKM sekaligus mendorong agar model serupa diperbanyak di seluruh daerah.

"PLUT ini sangat positif dan perlu dimultiplikasi di daerah-daerah lain. Dari 107 PLUT yang sudah berdiri secara nasional, baru sekitar 40 persen yang berjalan reguler. Karena itu, kita mendorong agar setiap dari 517 kabupaten/kota di Indonesia bisa memiliki lembaga seperti ini," ujar Saleh kepada *Parlementaria*, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/9).

Menurutnya, keberadaan PLUT terbukti memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM. PLUT

Kabupaten Bandung, misalnya, telah menyalurkan sekitar Rp70 miliar modal usaha tanpa bunga kepada masyarakat, di mana subsidi bunganya ditanggung oleh pemerintah daerah. Skema ini dinilai efektif untuk memperluas akses pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Selain penyaluran modal, PLUT juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, peningkatan keterampilan, hingga pengembangan kepemimpinan

usaha. Saleh menilai fasilitas ini menjadi jawaban atas kesulitan UMKM dalam mengakses pembinaan dan modal secara mandiri.

Lebih jauh, Saleh mendorong agar PLUT mampu menjalin sinergi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta industri besar melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurutnya, dukungan dari bank penyalur dan perusahaan besar akan memperluas akses pembiayaan dan membuka lapangan kerja baru. — **ysm/rdn**

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja Pusat Layanan Usaha Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT UMKM) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).



FOTO : YSM/ANDRI

Kolaborasi Semua Pihak dalam Penanganan ODGJ



Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Abdul Azis Saepudin, saat mengikuti kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Abdul Azis Saepudin, mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/9).

Azis meminta masyarakat yang masih menemukan praktik pemasangan agar segera melapor kepada pemerintah desa. Desa nantinya bisa meneruskan laporan ke kecamatan dan pemerintah daerah, sehingga ada penanganan tepat melalui dinas sosial maupun sentra rehabilitasi.

“Kalau masih ada masyarakat atau ODGJ yang dipasung, segera lapor ke desa. Dari desa bisa diteruskan ke kecamatan dan pemerintah daerah. Jangan sampai

Kolaborasi ini penting agar setiap warga yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa ditangani sesuai prosedur. Desa juga harus aktif mengecek warganya, sehingga kasus pemasangan bisa dihentikan sepenuhnya

dibiarkan karena mereka berhak mendapatkan penanganan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini kepada **Parlementaria**.

Ia menegaskan perlunya kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga desa, dalam penanganan ODGJ. Sosialisasi dan edukasi juga harus ditingkatkan agar masyarakat memahami bahwa pemasangan bukan solusi, melainkan memperburuk kondisi pasien.

“Kolaborasi ini penting agar setiap warga yang mengalami gangguan kesehatan mental bisa ditangani sesuai prosedur. Desa juga harus aktif mengecek warganya, sehingga kasus pemasangan bisa dihentikan sepenuhnya,” pungkas Azis. — eno/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

MBG Utamakan Pangan Lokal

Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menegaskan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka pengawasan Program MBG sekaligus meninjau perkembangan Sekolah Penerima Program Gizi (SPPG) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/9).

Heru mengingatkan agar penyediaan makanan bergizi di

sekolah tidak bergantung pada produk olahan pabrikaan.

“Tolong dihindari makanan-makanan olahan yang tidak diakomodir, karena kita masih bisa menggunakan bahan makanan lokal. Di Kalimantan ini banyak ikan. Jadi, kalau makanan olahan seperti nugget, sosis, saya kira lebih baik menggunakan bahan-bahan lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Heru mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal agar Program MBG sekaligus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat

“Teruntuk Pak Wakil Wali Kota, sesuai arahan Presiden, untuk meningkatkan ekonomi daerah SPPG bisa bekerja sama dengan potensi lokal. Bisa BUMD, bisa UMKM, bisa Koperasi Merah Putih. Mereka bisa menyiapkan beras, bisa menyiapkan ikan,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta koperasi akan memastikan distribusi bahan pangan yang lebih merata, sekaligus memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPR RI memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai sasaran, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi daerah. — **gys/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/9/2025).

Perkuat Dukungan untuk Olahraga di Daerah



Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, saat bertukar cinderamata usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).

Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, menyoroti kurangnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan olahraga di daerah. Ia mendapati banyak persoalan strategis yang mengemuka terutama terkait pembinaan atlet, kesenjangan fasilitas, dan perhatian terhadap cabang olahraga disabilitas dan rekreasi.

Demikian disampaikan Reni kepada **Parlementaria** usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran pemangku kepentingan olahraga di Jawa Timur serta akademisi Universitas Negeri Surabaya (UNESA), di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/9).

“Harapan besar disampaikan,

Masih banyak fasilitas lain yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga ia berkomitmen akan bawa aspirasi daerah ini ke Menpora baru Erick Tohir.

mulai dari pembinaan atlet hingga sarana dan prasarana, Surabaya sudah punya sirkuit, tapi belum lengkap. *Support* dari pusat tetap dibutuhkan,” ujarnya.

Reni mengapresiasi infrastruktur olahraga yang sudah dimiliki Surabaya, seperti stadion berstandar FIFA. Namun, ia

menekankan bahwa masih banyak fasilitas lain yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga ia berkomitmen akan bawa aspirasi daerah ini ke Menpora baru Erick Tohir.

Reni menjelaskan bahwa semua catatan dalam kunjungan ini akan menjadi bahan pembahasan resmi dalam rapat Komisi X DPR RI dengan kementerian terkait. “Ini momen yang pas. Komisi X akan segera mengundang Pak Erick Tohir untuk mendengar langsung gagasan-gagasannya, termasuk arah kebijakan Kemenpora ke depan,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Menurutnya, Kemenpora memiliki peran penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana pemuda dan olahraga menjadi elemen strategis dalam pembangunan nasional. **afr/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



OJK Diminta Ketat Awasi Himbara

Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) serta Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK bidang pengawasan perbankan kembali menyoroti persoalan krusial di sektor perbankan, terutama terkait likuiditas bank dan optimalisasi penyaluran kredit.

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan bahwa pengawasan terhadap bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) harus lebih diperketat. Menurutnya, masih terdapat potensi dana pemerintah yang ditempatkan di bank justru tidak tersalurkan secara produktif kepada masyarakat dan dunia usaha.

Harus ada *tools* yang jelas untuk mengukur sejauh mana dana pemerintah yang disalurkan ke bank benar-benar digunakan untuk kredit produktif, bukan kembali ke pemerintah dalam bentuk SBN

“Jangan sampai nanti *over liquid* kemudian menjadikan kredit kita tidak baik, malah justru semakin memburuk. Harus ada *tools* yang jelas untuk mengukur sejauh mana dana pemerintah yang disalurkan ke bank benar-benar digunakan untuk kredit produktif, bukan kembali ke pemerintah dalam bentuk SBN,” ujar Idrus dalam rapat kerja tersebut, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Idrus menegaskan bahwa dana yang ditempatkan pemerintah di bank merupakan uang rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, OJK memiliki peran strategis untuk memastikan bank-bank Himbara tidak hanya menjaga likuiditas, tetapi juga menjalankan fungsi intermediasi perbankan secara sehat dan berkeadilan. — bit/rdn

Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri dalam rapat kerja tersebut, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).



FOTO : MRO/PDT

Dorong Pemerataan Energi



FOTO: RSB/PDT

Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, saat kunjungan kerja ke Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (18/9/2025).

Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dikenal memiliki potensi energi yang sangat besar. Kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, dan batubara, ditambah potensi energi terbarukan seperti tenaga air dari sungai-sungai besar, PLTA Kayan, energi surya, dan angin menjadikan Kaltara sebagai daerah strategis penghasil energi.

Namun, ironisnya, hingga kini masih terdapat desa-desa yang belum menikmati aliran listrik. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, tercatat sekitar 115 desa yang belum teraliri listrik, terdiri dari 80 desa perbatasan dan 30 desa terpencil.

Hal ini terungkap saat Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Tarakan, Kaltara. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menegaskan perlunya inovasi dalam program elektrifikasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kekayaan energi yang dimiliki Kaltara.

"Banyak program yang harus lebih berinovasi supaya masyarakat di sekitar lokasi, maupun masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, betul-betul merasakan manfaat. Jangan sampai kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi masyarakatnya tidak bahagia. Itu keluhan yang kami terima di Kaltara, dan itu yang akan kami

dorong menjadi perhatian," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu kepada **Parlementaria**, di Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (18/9).

Ia juga menyoroti masih rendahnya rasio elektrifikasi di daerah perbatasan. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketimpangan karena masyarakat di negara tetangga sudah menikmati penerangan, sementara desa-desa di perbatasan Indonesia masih gelap.

Komisi XII DPR RI berjanji akan memperjuangkan aspirasi tersebut agar program pemerataan listrik bisa dipercepat. Alfons optimistis, target Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan 100% rasio elektrifikasi nasional dapat tercapai.

rni/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

LPSK Perlu Diperkuat

Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, dan Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI. Rapat ini membahas masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. RUU ini telah ditetapkan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira usulan revisi ini mencerminkan komitmen kuat Komisi XIII bersama

para *stakeholder* dan mitranya untuk memperbarui regulasi demi mewujudkan keadilan substantif bagi saksi dan korban serta bertujuan untuk memperkuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Selain itu, RUU ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme perlindungan hukum, menghadirkan rasa aman bagi saksi dan korban, serta menyediakan bantuan medis, psikologis, dan fasilitas ganti kerugian,” ujar Andreas usai memimpin RDP di Gedung DPR RI, Rabu (17/9).

Disampaikan Andreas dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan titik lemah LPSK ini dalam melaksanakan

tugasnya, terutama koordinasi antar kelembagaan, kewenangan yang terbatas, sehingga melalui RUU ini penting untuk memperkuat lembaga ini. Selain itu, Andreas juga menekankan pentingnya memperbaiki definisi saksi, korban, dan perlindungan dalam revisi tersebut.

“Ini situasi yang tidak mudah berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi. Banyak kasus yang sifatnya misalnya kekerasan seksual yang tidak mau muncul ke permukaan. Perlu ada perlindungan khusus terhadap mereka. Ada masukan tidak harus saksi langsung atau korban memberikan kesaksian langsung, bisa melalui orang terdekat, misalnya keluarga,” ungkapnya. — **rnm/aha**



FOTO: MR/PDT

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira saat RDP dengan Bareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, dan Panitera Muda Pidana Khusus MA RI di Gedung DPR RI, Rabu (17/9/2025).



BKSAP Wacanakan Reformasi PBB

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan apresiasi mendalam atas pidato Presiden RI, Prabowo Subianto di KTT Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan di New York, AS. Secara tegas, Presiden Prabowo mengakui dan menyerukan kemerdekaan Palestina.

Pernyataan Presiden tersebut sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan bahwa pidato Presiden Prabowo menjadi tonggak penting yang semakin memantapkan posisi Indonesia di mata dunia. "BKSAP tentu bahagia dengan pidato Pak Presiden. Hal ini bukan hanya meneguhkan komitmen bangsa Indonesia untuk

membela Palestina, tetapi juga memperkuat kerja sama Selatan-Selatan," tegas Mardani yang juga merupakan Anggota DPR RI Komisi II tersebut dalam keterangan persnya, Selasa (23/9).

BKSAP menilai bahwa reformasi PBB juga merupakan hal yang mendesak agar lembaga internasional tersebut benar-benar menjadi forum keadilan global. Salah satu contoh tentang hak veto terutama yang sering digunakan Amerika Serikat menjadi bukti penghalang besar bagi tercapainya

perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Ketua DPR RI dalam berbagai kesempatan juga konsisten menyuarakan kemerdekaan Palestina di forum nasional maupun internasional. Hal ini memperlihatkan kesatuan sikap antara lembaga eksekutif dan legislatif Indonesia dalam memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat penuh.

Lebih lanjut, BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus berjuang bersama rakyat Palestina melalui jalur parlemen. Upaya ini dilakukan tidak hanya lewat forum-forum resmi, tetapi

Reformasi PBB juga merupakan hal yang mendesak agar lembaga internasional tersebut benar-benar menjadi forum keadilan global. Salah satu contoh tentang hak veto terutama yang sering digunakan Amerika Serikat menjadi bukti penghalang besar bagi tercapainya perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

juga melalui ragam aktivitas yang pernah digelar, seperti fun run solidaritas, penggalangan dana, seminar, konferensi lokal maupun internasional, yang semuanya bertujuan memperkuat dukungan bagi kemerdekaan Palestina.

BKSAP juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang senantiasa peduli dan tidak pernah lelah menyuarakan keadilan bagi Palestina. **— bia/aha**



Ketua BKSAP
DPR RI,
Mardani Ali Sera.

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



FOTO: DEP/PDT

Ruang Udara Jadi Pilar Kedaulatan



Anggota Pansus, Moreno Soeprapto dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara dipandang strategis karena ruang udara merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara sekaligus penopang pertahanan, keselamatan, dan perekonomian nasional.

Dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Moreno Soeprapto menegaskan bahwa pengelolaan ruang udara harus dilakukan secara terintegrasi. Tata kelola yang baik akan memungkinkan Indonesia menjaga keutuhan wilayah, sekaligus mendorong pertumbuhan

penerbangan sipil, militer, hingga sektor ekonomi dan budaya.

“Ruang udara adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara. Pengelolaannya memegang peranan penting dalam menjaga pertahanan, keselamatan, serta perekonomian Indonesia,” ujar Moreno, di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/09).

Ia menambahkan, meningkatnya jumlah penerbangan domestik maupun internasional menuntut adanya penataan ruang udara yang sistematis. Selain menjaga keamanan, pengelolaan yang tepat juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi, seperti sektor pariwisata dan industri kreatif.

Moreno juga menyampaikan pentingnya regulasi yang adaptif

terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya, dinamika teknologi penerbangan dan navigasi udara membutuhkan payung hukum yang jelas agar pemanfaatan ruang udara dapat berlangsung aman dan efisien.

“Indonesia membutuhkan undang-undang yang bisa mengakomodasi kebutuhan teknologi yang terus berkembang, sehingga mampu meningkatkan keselamatan penerbangan dan efisiensi operasional,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pengelolaan ruang udara melibatkan banyak lembaga, baik sipil maupun militer. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat agar pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif.

bit/rdn





Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi bersama tim saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Perum Bulog Tabahawa Maluku Utara di Ternate, Selasa (23/9). Foto: Balggys/bia



Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, saat meninjau dapur MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, Bali, Jumat (19/9). Foto: Agung/bia



DOKUMENTER
INVESTIGASI
REFERENSI INDONESIA



TVR
PARLEMEN

TRANSFORMASI SUARA DAPIL
AKSI DEWAN
MENDENGAR - MELIHAT - MEMBANGUN

SAKSIKAN HANYA DI:

<https://tvrparlemen.dpr.go.id>



TVR PARLEMEN

EXECUTIVE PRODUCER **MEIDI NUGROHO**
PRODUCER **ADRIANUS SEPTIANTO** LINE PRODUCER **HERI HERYADI**



Sampaikan aspirasi Anda melalui
SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri